Membangkitkan (Kembali) Kesadaran Beretika Publik

Kegelisahan sebagian besar bangsa Indonesia akhir-akhir ini mencapai titik puncak. Bukan karena isu pemakzulan Jokowi sebagai presiden oleh anggota parlemen dari Koalisi Indonesia hebat (KIH), tetapi adanya gerakan pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Gerakan ini mulai tergambar jelas pasca KPK menetapkan calon pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai tersangka. Tanpa mau berpolemik apakah disengaja atau tidak, penetapan sebagai tersangka tersebut direspon Polri dengan penangkapan salah satu komisioner KPK beberapa waktu yang lalu.

Kuncinya ada pada keputusan Presiden Jokowi. Jokowi seolah berada pada bandul kekuasaan (*power*) dan etika publik. Jokowi menginginkan Indonesia ke depan harus dibangun melalui pondasi moral dan etik yang benar, yang dalam konsep umum sering disebut sebagai revolusi mental. Konsep revolusi mental ini, hingga saat ini masih belum menemukan formulasi yang tepat baik dalam ranah kebijakan, metode apalagi kerangka tindakan/praktis.

Sementara, tekanan politik-kekuasaan makin berat kearah Jokowi. Jokowi berada dalam pusaran kekuasaan yang luarbiasa hebat. Menurut pengamat politik Hanta Yudha, Jokowi saat ini berada di tengah-tengah kekuatan yang memiliki kekuatan yang punya kepentingan beragam : (1) partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), khususnya tekanan dari partai NasDem dan PKB; (2) kelompok bisnis;(3) ormas atau kelompok kepentingan, terutama yang dulu ikut menyokong pencapresan Jokowi;(4) Koalisi Merah Putih (KMP), yang menurut Hanta, memberikan tekanan dengan cara yang berbeda dengan KIH;(5) kemungkinan tekanan dari wapres; dan (6) PDI-Perjuangan.

Berbagai tekanan seperti ini sebenarnya wajar dalam dunia politik.Sebenarnya kelompok-kelompok semacam itu juga dihadapi SBY saat di awal-awal menjadi presiden. Presiden dipaksa mengakomodir kepentingan-kepentingan itu.Yang penting harus punya keberanian dan keterampilan mengelola komunikasi dan negosiasi politik. Keputusan presiden Jokowi benar-benar diharapkan publik, agar Jokowi bisa fokus mengelola pemerintahan.

Tidak ada yang perlu ditakutkan Jokowi, terkait resiko yang kemungkinan terjadi setelah keputusan diambil. Jika Jokowi bersandar pada apa yang diinginkannya sejak masa kampanye dulu, membangun Indonesia dengan berpondasi pada etika publik, maka prinsip-prinsip kebijakan yang akan dilahirkannya pasti mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Memang tidak mudah. Kalkulasi politik tetap harus dihitung secara matang.

Beberapa kalkulasi atau daya tawar yang perlu dipertimbangkan

secara matang yaitu isu "pemakzulan" terhadap presiden dari beberapa partai politik, dimana delegitimasi oleh parpol menjadi sebuah keniscayaan. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban terhadap rakyat yang mendukungnya, dimana komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta kepercayaan publik yang tidak bisa dibantah. Jokowi tentu harus lebih khawatir dengan yang terakhir ini. Karena daulat rakyat lebih penting dari daulat partai pendukung. Ingat sebagai presiden, Jokowi adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik partai politik.

Pertanyaannya adalah akankah Jokowi menambatkan etika publik diseberang kekuasaannya ? Pertaruhannya terlalu besar. Saya yakin Jokowi akan tetap memilih keputusan yang tepat dan akan tetap menempatkan etika publiksebagai dasar pengambilan keputusan ini. Jokowi akan tetap mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan partisipatif sebagai metode penetapannya, serta mengedepankan integritas publik dalam tindakan nyata.

*****

Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan kuat (*strong leadership*) dan kepemimpinan yang mampu mentrasformasikan nilai-nilai dasar ideologis bangsa, Pancasila sebagai pondasi (*transformational leadership*) untuk Indonesia yang lebih berintegritas dan Indonesia hebat. Hal ini penting, karena Indonesia hari ini adalah Indonesia dengan tingkat korupsinya yang masih tinggi. Korupsi merupakan masalah terbesar bangsa ini. Berbagai survey baik nasional maupun internasional mengkonfirmasi hal demikian.

Pada tahun 2014, *Transparency International* (TI) misalnya, menempatkan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*, CPI) diposisi 107 dari 175 negara yang diukur. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, maka skor Indonesia mengalami kenaikan 2 point menjadi 34 dari 32 posisi sebelumnya. Ini berarti Indonesia jauh tertinggal dari beberapa Negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Filipina memiliki skor CPI yang jauh lebih tinggi yakni masing-masing sebesar 84, 52 dan 38. Meskipun demikian, Indonesia tetap lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam dan Timor Leste yang memiliki skor masing-masing 31 dan 28.

Skor CPI Indonesia sebesar 34 ini perlu diapresiasi. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini sebagai bentuk kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah melalui KPK telah bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga penindakan. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai lembaga dan ormas keagamaan sekelas Muhammadiyah dan NU pun juga memiliki andil yang tidak kecil.

Buah dukungan ini tergambar dalam Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013.Dalam survey itu, 71% responden paham

bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Informasi lain, seperti Global Corruption Barrometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengonfirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan Parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat. Ini berarti bahwa problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia (Trisasongko, 2014).

Survei Integritas Layanan Publik 2014 juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 maka integritas layanan 11,24 persen pada tahun 2014 dari 6,49 menjadi 7,22 pada skala 0-10. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia mengalami peningkatan kualitas (KPK, 2014).

Hasil survey Kemitraan (2014) terkait Indonesia Governance Index (IGI) 2012 menunjukkan kualitas tata kelola tingkat provinsi lebih tinggi daripada tahun 2008. Skor rata-rata 5,1 pada tahun 2008 menjadi 5,7 pada tahun 2012, naik 0,6 poin indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola sebenarnya membaik dan dapat dijadikan modal untuk bergerak ke arah yang lebih substantif yaitu pemerataan kesejahteraan.

Sayangnya hasil yang cukup baik di tingkat provinsi ini tidak diikuti oleh hasil IGI di 34 Kabupaten/kota. Dengan menggunakan 126 indikator, IGI 2012 menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/ kota yang tergolong buruk (rata- rata 4,92 dari skala 1 -10). Hal ini membuktikan bahwa baik pemerintah dan masyarakatbelum bersama-sama secara optimal melakukan refleksi dan berinteraksi guna membangun daerah.

Dari survey IGI 2012, yang menempatkan empat aspek yang dinilai yakni aspek pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi terlihat 10 provinsi terbaik yakni : Di Yogyakarta (6,8); Jawa Timur (6,43); DKI Jakarta (6,37), Jambi (6,24); Bali (6,23); Sumatera Selatan (6,19); Kalimantan Selatan (6,19); Riau (6,18); Sulawesi Utara (6,17) dan Lampung (6,01). Disamping itu, beberapa provinsi memiliki perhatian khusus karena mereka berada pada indeks terburuk yakni Kepulauan Riau (5,60); Sulawesi Tengah (5,47); Kalimantan Barat (5,11); Sulawesi Utara (5,05); Maluku (4,95); Papua (4,88); Nusa Tnggara Timur (4,87); Bengkulu (4,81); Papua Barat (4,48) dan Maluku Utara (4,45).

Dari gambaran survey tersebut terlihat jelas bahwa fokus bangsa ini belum bisa beralih ke ranah selain korupsi. Keberadaan KPK masih dibutuhkan.Kesadaran etis bangsa ini perlu terus didorong. Semua kita telah mengetahui niat presiden Jokowi untuk pemberantasan KKN, bahkan masyarakat kita telah tumbuh kesadarannya untuk melawan korupsi, bahkan anak-anak kita telah diajarkan bagaimana benci terhadap korupsi melalui kurikulum di sekolah. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan

nyata dari Presiden Jokowi melawan korupsi sebagai tindakan konkrit membangun integritas bangsa.

*****

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik (Haryatmoko: 2013:3). Menurut Haryatmoko, terdapat tiga fokus yang menjadi perhatian etika publik:petama, kualitas publik yang berkualitas dan relevan; kedua, bukan hanya kode etik, tetapi peran reflektifnya. Perannya menjadi sangat penting terutama dalam memberikan pertimbangan pada pilihan sarana kebijakan publik sekaligus sebagai alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya, dan upaya politik, social, budaya, dan ekonomi yang standar dalam menciptakan institusi-institusi yang lebih adil; dan ketiga, fokus pada modalitas etika yakni bagaimana menjembatani antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan factual.

Tekanan pada modalitas ini, menurut Haryatmoko ingin menjawab keluhan dan sinisme bahwa dihampir semua kehidupan termasuk institusi Negara telah dilengkapi dengan perangkat norma dankode etik, bahkan ia telah diajarkan, disosialisasikan, didiseminasikan dengan anggaran Negara yang sangat besar, bahkan agama sudah memberikan semua petunjukkanya lewat kitab suci, namun kenapa korupsi terus merajalela. Lantas nilai lebih apa yang dimiliki oleh etika publik, atau jangan-jangan hanya bentuk lain dari ajaran tentang 'apa yang seharusnya'.

Dititik inilah kita perlu segera bangkit untuk menyadari bahwa bangsa ini belum beranjak dari ajaran 'apa yang seharusnya'.Selama ini kita mungkin tidak menyadari kesalahan kita sendiri yang berasumsi bahwa 'mengetahui' itu seakan-akan sama dengan 'telah melakukan'. Padahal masih ada jarak antara tahu dengan tindakan. Sekali lagi arah etika publik bukan hanya apa yang baik atau moral, tetapi memfokuskan pada refleksi bagaimana menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata. Karenanya, menurut Haryatmoko, etika publik mengutamakan etika institusional, yakni bagaimana mengorganisir agar tanggungjawab bisa dijalankan, mencari prosedur atau norma termasuk system agar tindakan etis dapat dilakukan.

Menurut Benhard Sutor (1991) sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko (2013:5-6), bahwa etika publik memiliki tiga dimensi penting: tujuan (*policy*), modalitas atau sarana (*polity*), dan tindakan (*politics*). Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Dimensi modalitas (sarana) memberikan tekanan pada bagaimana pencapaian tujuan menjadi efektif dilaksanakan. Dimensi ini meliputi system dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik pelayanan publik yang lebih adil, transparan, akuntabel dan professional. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada :pertama, peran etika publik dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan intitusi dan praktik-praktik politik; kedua, sikap

dalam menghadapi struktur, yakni menyetujui atau menolak tatanan sosial, ekonomi dan politik; dan ketiga, prinsip subsidiaritas dalam pelayanan publik. Artinya jika masyarakat, asosiasi-asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga nirlaba lainnya mampu mengorganisir atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan dan sarana yang dimilikinya maka Negara tidak perlu turut campur. Negara hanya perlu mengatur saja. Dengan demikian, inisiatif dan keberanian untuk mengambil tanggungjawab pribadi nyata da nada ditengah masyarakat. Dimensi tindakan politisi dan pejabat publik dituntut untuk memiliki integritas publik. Pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan–kualitas moral pelaku. Tindakan politik disebut rasional apabila pelaku memiliki orientasi situasi dan memahami permasalahan.Ini membutuhkan kompetensi teknis, leadership dan etik. Pejabat publik atau politisi ditutut memiliki integritas publik, dalam arti menghindari kekerasan menjadi imperative moral –ungkapan hormat terhadap martabat manusia—maka penguasaan manajemen konflik adalah sarat aksi politik yang etis (Haryatmoko, 2013:7).

Kebijakan publik memiliki makna karena memperhitungkan kepentingan publik dan responsive terhadap harapan, keluhan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna etis semakin tersurat ketika tindakan didasari belarasa dan keberpihakan kepada yang lemah, miskin atau tersingkir. Keberpihakan hanya bermakna bila diterjemahkan dalam institusi.

*****

Etika publik bukanlah hanya sebuah rumusan kebijakan, strategi, atau cara yang diajarkan pada seluruh anak bangsa. Tetapi etika publik adalah sebuah tindakan nyata yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia hebat sebagaimana jargon Jokowi yang dilancarkan dalam kampanyenya yang kemudian mendapatkan simpati rakyatnya. Semua elemen memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pemimpin yang terkenal dengan kesederhanaannya. Simpati dunia pun mengalir terhadapnya.

Semua simpati ini harus dipandang sebagai harapan dan pekerjaan rumah yang harus diimplementasikannya. Jika tidak, rakyat bisa berbalik tidak memberikan dkungan dan Jokowi akan kehilangan kepercayaan publik, sampai akhirnya ditinggalkan sejarah dan rakyat.

Soal KPK vs Polri Jokowi perlu memegang teguh prinsip bernegara dimana Indonesia dibangun dari landasan etik yang sangat kuat yakni landasan ideologis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.Presiden tidak perlu canggung untuk menjalankan titah dan amanah rakyat yang telah memberikan dukungan penuh.Bahkan, seorang penantangnya, Prabowo Subiyanto punmemberikan dukungan, asalkan semua langkah Jokowi didedikasikan untuk kepentingan rakyat Indoonesia. Namun semuanya kembali pada Jokowi: untuk Indonesia yang lebih baik atau untuk kepentingan sesaat, kekuasaan ! **Mariman Darto**.